Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 01, No.1, Juli-Desember 2023
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Faisal Affandi[1], Melda Diana Nasution[2]
[1]Ekonomi Syariah , Stain Mandailing Natal, [2]Pendidikan Agama Islam,
Stain Mandailing Natal
faisalaffandise@gmail.com, meldadiana83@gmail.com

Abstrak

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental *(instrumental input)* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun lembaga pendidikan islam. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan pada lembaga islam saat ini serta bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga islam adapun tujuan dari makalah ini adalah bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan pada lembaga islam saat ini dan bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga islam.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembiayaan, Pendidikan.Islam.

Abstract

The classic problem that still often approaches educational institutions, especially Islamic educational institutions in the country, is the problem of equitable education and education financing that is said to have not been maximal in its realization. This affects almost all other components of education. In fact, the cost of education is one component of instrumental input that is very important in the implementation of education in schools and Islamic educational institutions. In all efforts to achieve educational goals, the cost and financing of education has a very decisive role. Almost no educational effort can ignore the role of cost, so it can be said that without cost, the education process can not run to the maximum, how mnajemen education financing in Islamic institutions as for the purpose of this paper is how the policy of education financing in Islamic institutions today and how mnajemen education financing in Islamic institutions.

Keyword: wisdom, Financing, education.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental *(instrumental input)* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun lembaga pendidikan islam. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat meng- abaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal

Pada tataran perencanaan, sosialisi program, pengadaan fasilitas, pelaksanaan, supervisi, evaluasi, serta instrumen pendukung pendidikan lainnya, hampir semuanya membutuhkan biaya, baik secara langsung maupun tidak. Lebih dari itu, dalam upaya suksesi berbagai agenda pendidikan, baik secara langsung maupun tidak, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, pembiayaan menjadi salah satu –meskipun bukan satu-satunya– faktor yang mem- pengaruhi hasilnya. Pasalnya biaya adalah pendorong lajunya berbagai program untuk mencapati tujuan yang telah ditetapkan.

Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun lembaga pendidikan islam dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada. Semua itu memerlukan

anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagai- mana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik.

menganalisis kebijakan pembiayaan pendidikan pada lembaga islam, tidak hanya berbicara konsep, penulis juga memaparkan corak manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam

B. LANDASAN TEORI

Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa menggunakan *cost, finansial,* dan *expenditur.* Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Tanpa adanya biaya yang memadai maka sekolah/lembaga pendidikan islam akan berkembang secara lambat. Jadi Biaya menjadi hal yang urgen utamanya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan progam pendidikan.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada tiga pernyataan yang terkait di dalamnya. Seperti dikemukakan oleh Akadon dkk yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan.

Matin mendefinisikan bahwa konsep biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah terhadap

pembangunan pendidikan agar tujuan serta cita-cita yang sudah ditentukan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya biaya pendidikan harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat.
Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Di sisi lain, pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan. Agar sekolah atau lembaga pendidikan islam tetap eksis dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Dalam pasal 49 ayat 1 dikemukakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam lembaga Pendidikan Islam salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik adalah masalah keuangan.
Dalam konteks ini keuangan atau biaya adalah merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah/lembaga pendidikan islam sebagai alat untuk

melengkapkan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan islam, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi.

Konsep pembiayaan lembaga pendidikan Islam, secara tersirat sudah ada sejak dahulu kala, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang memiliki arti : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Al-Baqarah: 197).

Bertolak dari ayat di atas, Allah Swt tidak serta merta memerintahkan kita melakukan langkah manajemen modern. Allah Swt juga tidak secara implisit mengajarkan kepada manusia tentang definisi manajemen pembiayaan pendidikan. Tetapi dengan ayat di atas, Allah seakan-akan mengatakan bahwa umat manusia harusnya bisa sukses. Untuk lebih menguatkan lagi, rasulullah Saw bersabda: *"barang siapa yang berbekal dalam dunia, maka hal itu akan memberikannya manfaat di akhirat kelak". (H. R. Jarir Ibnu Abdillah).*

Secara lebih eksplisit lagi, konsep manajemen pembiayaan pendidikan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa:

"Ingatlah bahwa kamu akan memperoleh ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat ayang akan aku terangkan secara ringkas. (1). Cerdas. (2). Rajin. (3). Sabar. (4). Mempunyai bekal. (5). Petunjuk guru. (6). Waktu yang lama atau panjang".

Secara jelas, syair di atas mengungkapkan betapa pentingnya arti kata biaya dan manajemennya dalam dunia pendidikan. Biaya sangat menentukan terhadap terlaksananya kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Tanpa biaya suatu perencanaan progam sekolah/lembaga pendidikan islam yang sudah ditentukan maka kegiatan kegiatan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

C. METODE

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam telah mulai berlangsung di Indonesia sejak masuknya para pedagang muslim ke negeri ini pada abad VII M. Mula-mula pendidikan agama hanya berlangsung antara individu dengan individu lainnya. Materi yang diajarkan pun hanya berkisar pada prasyarat seseorang menjadi muslim. Proses pendidikan Islam kemudian berkembang ke arah kolektif ketika sudah memberi pengaruh yang signifikan di masyarakat Indonesia.

Pengaruh pendidikan agama yang dilaksanakan oleh para dai muslim menemukan hasilnya ketika pada abad X berdiri kerajaan Islam pertama di Aceh yang bernama

Pase atau kerajaan samudra (kerajaan ini juga dikenal dengan samudera pasai). Di kerajaan ini dilangsungkan pendidikan agama dengan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya.

Hal ini sesuai dengan laporan Ibnu Batutah dalam bukunya Rihlah Ibnu Batutah bahwa ketika ia berkunjung ke samudra pasai pada tahun 1354 ia mengikuti raja mengadakan halaqah setelah shalat jumat sampai waktu asar. Dari keterangan itu diduga kerajaan samudra pasai ketika itu sudah merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpul ulama dari berbegai negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus.

Zuhairi dkk. melihat bahwa pendidikan agama semi formal pertama yang berlangsung di Indonesia adalah majlis ilmu yang berlansung di kerajaan samudera pasai. Sistem pendidikan agama yang berlasung di kerajaan ini adalah sebagai berikut:

a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fiqh Madzhab Syafi'i.

b. Sistem pendidikannya secara nonformal berupa majlis taklim dan halaqah.

c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.

d. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara.

Jadi, pada masa kerajaan Islam Pasai ini, pendidikan agama dilangsungkan oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan itu sendiri. Bahkan, setelah berdirinya Kerajaan Perlak pendidikan agama berkembang sangat baik. Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin, Raja keenam Perlak, mendirikan perguruan tinggi Islam yang diperuntukkan bagi siswa yang telah alim. Dengan dukungan pendanaan dari kerajaan, perguruan ini dapat mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi seperti Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i dan sebagainya.

Berawal dari Aceh, Pendidikan Islam terus berkembang ke penjuru nusantara. Di Jawa, misi ini diusung oleh Sunan Giri menitikberatkan kegiatannya pada bidang

pendidikan. Dalam hal kurikulumnya ia mengadakan kontak dengan kerajaan Pase yang bermadzhab Syafi'i.

Pendidikan Islam selanjutnya berkembang dari majlis taklim di kerajaan terus berkembang ke surau-surau dan masjid. Di Sumatera Barat surau-surau berkembang menjadi tempat pengajian untuk pemuda-pemuda muslim. Salah satunya surau besar yang mirip konsep pesantren muncul di Batuhampar Payakumbuh yang didirikan oleh Syaikh Abdurrahman pada tahun 1777.

Kompleks ini kemudian dikenal sebagai "Kampung Dagang". Kampung Dagang dibangun dengan sarana dan fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Di dalam kawasan yang luasnya sekitar 3 hektare ini ada sebuah pasar kecil, di mana terdapat beberapa kedai tempat menjual berbagai kebutuhan murid sehari-hari. Jumlah orang siak (santri) yang belajar di Kampung Dagang ini berkisar antara 1000 sampai 2000 orang.

Untuk mengikuti pelajaran di surau santri tidak dikenakan pungutan atau pembayaran apapun, tidak dikenakan uang sekolah, uang asrama atau uang makan. Jarang sekali santri memberikan uang kepada syaikh. Kalaupun ada, di samping oleh keluarga yang bersangkutan, diberikan atas dasar kerelaan dan keikhlasan.

Biaya hidup dari santri berasal dari orang kampung yang berdekatan dengan surau, biasanya dijemput sendiri atau diantarkan oleh orang tua mereka. dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup santri, masyarakat kota yang berdekatan, seperti payakumbuh, juga tidak kurang pula partisipasinya. Setiap hari minggu mereka mengantarkan beras, sayur dan kebutuhan pokok lainnya ke surau dengan pedati. Sedangkan santri yang datang dari negeri yang jauh, biasanya tiap hari kamis menyebar ke negeri-negeri sekitar Batuhampar dengan membawa buntil (tempat beras seperti kantong terigu) dan sore harinya kembali dengan membawa buntilan beras dan uang untuk biaya seminggu.

Lembaga pendidikan tertua di Jawa pesantren telah berupaya memperbaharui sistem pendidikannya. Pada masa ini telah muncul pesantren-pesantren yang

berupaya mengadaptasi perubahan sistem pendidikan konvensional. Sedikitnya terdapat dua cara yang dilakukan pesantren dalam merespon perubahan ini : Pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan sebagian mata pelajaran dan keterampilan umum. Kedua, membuka kelembagan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.

Dengan kedua cara tersebut maka persentuhan antara sistem pesantren dengan sistem lembaga pendidikan islam sudah sangat terasa. Untuk itu, setidak-tidaknya pada masa ini muncul empat tipe pondok pesantren di Nusantara:

a. Ponpes tipe A adalah pondok yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional;

b. Ponpes tipe B adalah pondok yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi);

c. Ponpes tipe C adalah pondok yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar;

d. Ponpes tipe D adalah pondok yang menyelenggarakan sistem ponpes sekaligus sistem sekolah dan lembaga pendidikan islam.

Namun dari segi manajemen pembiayaan belum muncul konsep yang baru dari beberapa tipe pesantren yang muncul. Meski kemandirian telah menjadi pola hidup pesantren, tetapi pada umumnya pembiyaan pesantren masih bergantung pada usaha yang dilakukan oleh kyai dan sumbangan pihak luar. Rata-rata pesantren tidak memiliki usaha yang dapat menjamin keberlangsungan pesantren.

Hal ini tentu bukan realitas yang menggembirakan, mengingat usaha yang dilakukan kyai secara individu tidak berjalan selamanya. Di samping itu, pada dasarnya setiap lembaga pendidikan membutuhkan penopang dana abadi demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pesantren di masa yang akan datang.

Hingga muncul harapan baru dari beberapa pengasuh pesantren yang mencoba menggagas ber pendanaan lembaga pendidikannya. Di antaranya adalah dilakukan oleh Pesantren Pertanian Darul Falah Bogor, Pesantren Al Zaitun, Pesantren Gontor dan lain-lain.

Sebagai gambaran, akan diuraikan salah satu gagasan dari konsep pembiayaan berbasis wakaf yang ditawarkan oleh pesantren Gontor. Meniru apa yang dilakukan oleh pengelola al-Azhar di Mesir dan Aligarh di India yang terjamin kelangsungan lembaganya karena kekayaan wakaf yang di miliki, maka di pesantren ini juga berupaya mengelola perekonomiannya dengan basis wakaf. Untuk itu, pesantren ini memulai pewakafan pondok pada tanggal 28 Rabiul Awwal 1378/12 Oktober 1958. Pewakafan dilakukan oleh pendiri pesantren Gontor kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor yang diwakili oleh 15 orang yang dipercaya sebagai nadhir. Para nadhir yang berjumlah 15 orang tersebut kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.

Badan Wakaf Gontor kemudian menjadi badan tertinggi yang membawahi beberapa lembaga di pesantren tersebut. Demi menjaga dan mengembangkan harta wakaf yang dimiliki maka Badan Wakaf Gontor membentuk Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengatur jalur perekonomian, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga dapat menjadi sumber dana yang halal serta dapat menjamin kemandirian Pondok. Lembaga ini berada di bawah kendali langsung badan tertinggi pondok, yaitu Badan Wakaf Pesantren Gontor.

E. PENUTUP

Pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam adalah merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana cara penggunaan dana untuk kemaslahatan sekolah agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Matin mendefinisikan bahwa konsep biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah terhadap

pembangunan pendidikan agar tujuan serta cita-cita yang sudah ditentukan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya biaya pendidikan harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Secara lebih eksplisit lagi, konsep manajemen pembiayaan pendidikan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa:

"Ingatlah bahwa kamu akan memperoleh ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat ayang akan aku terangkan secara ringkas. (1). Cerdas. (2). Rajin. (3). Sabar. (4). Mempunyai bekal. (5). Petunjuk guru. (6). Waktu yang lama atau panjang".

Dalam Islam, sejarah pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.

Selanjutnya sejarah pembiayaan pendidikan islam nusantara dapat kita lihat pada masa kerajaan Islam Pasai, pendidikan agama dilangsungkan oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Al-Maliki. 1963. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla,* Hizbut Tahrir .

Akadon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan. 2015. *Manajemen Pembiayaan .* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Baharuddin dan Moh. Makin.2010. *Manajemen Pendidikan Islam,* Malang: UIN MALIKI PRESS.

Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

H Jhones, Thomas. 1985. *Introduction to School Finance Technique An Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company.

Ibrahim Muhammad, Quthb. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li 'Umar bin Khaththab),* Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.

Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasnya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mulyono. 2010 *Konsep Pembiayaan Pendidikan.* Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam.* Malang: Erlangga.

Sulistyorini. 2006. *Manajemen Pendidikan Islam.* Surabaya: elKAF.

Supriyadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Tampubolon, Manahan. 2015. *Perencanaan dan Keuangan pendidikan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Al-Jawi, Shiddiq. 2007. *Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam.* Jurnal House of Khilafah.

Munir, Ahmad. *Manajemen Pembiayaan dalam Perspektif Islam.* Jurnal At-Ta'dib Vol.8 No 2, 2013

Nunu, Ahmad. *Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi*, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bandung, Volume 5 Nomer 2 April-Juni 2007.